

## ABSTRAK

NUR MUIZ JIDDAN AL-AYYUBI, 12103193132 “Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri” Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2023, Pembimbing Yusron Munawir, S.H.I, M.H.

Kata kunci: Bantuan modal usaha, DBHCHT, dan UMKM

Penelitian ini didasari oleh Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, namun dalam implementasinya bantuan modal usaha di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri masih terdapat beberapa persoalan, yang mengakibatkan masih banyak UMKM yang belum mendapatkan bantuan modal usaha tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri.”

Fokus penelitian ini tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri adalah: 1) Bagaimana implementasi pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri? 2) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap regulasi pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri? 3) Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai tembakau?. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui implementasi pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri. 2) Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap regulasi pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri. 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai tembakau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Dalam implementasi program bantuan modal usaha di Kelurahan Ngadirejo terdapat beberapa tahapan yang pertama adalah sosialisasi yang berisi mengenai bagaimana cara pendaftaran dan persyaratan yang harus di penuhi oleh calon pendaftar. Kedua, adalah membuka pendaftaran bantuan modal usaha yang dilakukan secara daring melalui web dan luring di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Ketiga, dinas melakukan tahap verifikasi data berkas calon pendaftar. Keempat, dinas melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu penyurvei untuk melakukan verifikasi data secara

langsung di lapangan. Kelima, dinas memberikan pengumuman penerima bantuan modal usaha dan melakukan pengawasan terhadap UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha dengan melihat pembukuan pembelanjaan sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Belanja) UMKM tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian masih ada beberapa persoalan yaitu, a) Sosialisasi mengenai bantuan modal usaha masih belum banyak diketahui oleh beberapa UMKM sedangkan sosialisasi ini sendiri dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial dinas ; b) Dugaan adanya praktek pungli pada saat penyaluran dana bantuan modal usaha yang seharusnya UMKM menerima secara penuh sejumlah Rp.2.400.000 bantuan modal usaha akan tetapi mengalami pengurangan menjadi Rp.2.350.000 setiap UMKM; c) Dalam penyeleksian berkas persyaratan pendaftaran bantuan modal usaha yang dilakukan oleh dinas ada beberapa persoalan yaitu ada UMKM yang mendaftar dengan memenuhi syarat akan tetapi tidak lolos tahap verifikasi berkas, sedangkan ada salah satu UMKM yang tidak memenuhi persyaratan akan tetapi lolos dalam verifikasi berkas dan mendapat bantuan modal usaha. Dalam asas *equality before the law* semua orang dimata hukum harus mendapatkan jaminan keadilan yang sama dan juga dalam keadilan komutatif masalah penentuan hak yang adil antara beberapa individu yang setara; dan d) tidak adanya aturan yang mengatur bilangan prosentase pasti dalam pemberian bantuan modal usaha sehingga dapat menimbulkan potensi merugikan pemerintah seperti adanya kasus korupsi terhadap dana tersebut. Dalam tinjauan hukum islam apabila pajak diperbolehkan oleh islam akan tetapi apabila pajak tersebut terlalu membebani atau melebihi kemampuan masyarakat atau ditarik secara pungli yang bisa di kategorikan *al-maksu* seperti: a) Dipungut secara ilegal atau liar (pungli); b) Dipungut secara zalim dan semena-mena; c) Nilainya membebani kehidupan rakyat; dan d) Digunakan untuk kepentingan pribadi penguasa atau kelompoknya. Seperti halnya beberapa kriteria tersebut yang tidak diperbolehkan oleh islam. Implementasi program bantuan modal usaha ini masih belum mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh UMKM di Kota Kediri karena masih adanya kekurangan dalam implementasi di lapangan, sehingga program bantuan modal usaha yang seharusnya bisa dirasakan manfaatnya secara menyeluruh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri ini masih belum maksimal.

## ABSTRACT

NUR MUIZ JIDDAN AL-AYYUBI, 12103193132 "Juridical Review of Regulations for Providing Business Capital Assistance from Revenue Sharing Funds from Excise on Tobacco Products in Ngadirejo Village, Kediri City Sub-District" Study Program of Constitutional Law, Department of Sharia, Faculty of Sharia and Law, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University, 2023, Supervisor Yusron Munawir, S.H.I, M.H.

Keywords: Business capital assistance, Tobacco Excise Revenue Sharing Fund, and MSMEs.

This research is based on Kediri Mayor Regulation Number 5 of 2023 concerning Amendments to Mayor Regulation Number 45 of 2022 concerning Technical Instructions for Providing Business Capital Assistance Sourced from Revenue Sharing Funds from Excise on Tobacco Products, however in its implementation business capital assistance in Ngadirejo Village, Kediri City District is still There are several problems, which result in many MSMEs not receiving business capital assistance. So the researcher is interested in conducting research in the form of a thesis with the title "Judicial Review of the Regulations for Providing Business Capital Assistance from Tobacco Excise Profit Sharing Funds in Ngadirejo Village, Kediri City District."

The focus of this research on the Juridical Review of the Regulations for Providing Business Capital Assistance from Revenue Sharing Funds from Excise on Tobacco Products in Ngadirejo Village, Kediri City District, is: 1) How is the implementation of providing business capital assistance from revenue sharing funds from tobacco excise in Ngadirejo Village, Kediri City District? 2) What is the juridical review of the regulations for providing business capital assistance from revenue sharing funds from tobacco excise in Ngadirejo Village, Kediri City District? 3) What is the review of Islamic law regarding the provision of business capital assistance from tobacco excise revenue sharing funds? This research aims to: 1) To determine the implementation of providing business capital assistance from revenue sharing funds from tobacco excise in Ngadirejo Village, Kediri City District. 2) To find out the juridical review of the regulations for providing business capital assistance from revenue sharing funds from tobacco excise in Ngadirejo Village, Kediri City District. 3) To find out about Islamic law regarding the provision of business capital assistance from tobacco excise revenue sharing funds. The research method used is empirical legal research with a statutory and case approach.

The results of this research show that: In implementing the business capital assistance program in Ngadirejo Village, there are several stages, the first of which is socialization which contains how to register and the requirements that must be fulfilled by prospective applicants. Second, is to open registration for business capital assistance which can be done online via the web and offline at the Trade and Industry Service office. Third, the department carries out the data verification stage

of prospective registrants' files. Fourth, the department collaborates with third parties, namely surveyors, to verify data directly in the field. Fifth, the department provides announcements about recipients of business capital assistance and supervises MSMEs that receive business capital assistance by looking at the expenditure books in accordance with the MSMEs' RAB (Expenditure Budget Plan). Based on the results of the research, there are still several problems, namely, a) Socialization regarding business capital assistance is still not widely known by several MSMEs, whereas this socialization itself is carried out directly or through official social media; b) Allegations of extortion during the distribution of business capital assistance funds where MSMEs should have received the full amount of IDR 2,400,000 in business capital assistance but this was reduced to IDR 2,350,000 for each MSME; c) In the selection of documents for registration of business capital assistance requirements carried out by the department there were several problems, namely there were MSMEs that registered by fulfilling the requirements but did not pass the file verification stage, while there was one MSME that did not meet the requirements but passed the file verification and received business capital assistance. In the principle of equality before the law, all people in the eyes of the law must receive equal guarantees of justice and also in commutative justice the problem of determining fair rights between several equal individuals; and d) there are no regulations governing the exact percentage figures for providing business capital assistance, which could result in potential losses to the government, such as cases of corruption involving these funds. In view of Islamic law, taxes are permissible in Islam, but if the tax is too burdensome or exceeds the community's capabilities or is levied as extortion, it can be categorized as *al-maksu*, such as: a) It is levied illegally or illegally (extortion); b) Collected unjustly and arbitrarily; c) Its value burdens people's lives; and d) Used for the personal interests of the ruler or his group. Just as some of these criteria are strictly not permitted by Islam. And also, the implementation of this business capital assistance program has not yet brought benefits to all MSMEs in Kediri City because there are still shortcomings in implementation in the field. So the business capital assistance program, which should provide comprehensive benefits to improve the welfare of the business community in Ngadirejo Village, Kediri City District, is still not optimal.

## الملخص

نور موعيز جيدان الأيوبي، ١٢١٠٣١٩٣١٣٢ "المراجعة القانونية للوائح تقديم مساعدة رأس المال التجاري من أموال تقاسم الإيرادات من الرسوم المفروضة على منتجات التبغ في قرية نجاديريجو، المنطقة الفرعية لمدينة كديري" برنامج دراسة القانون الدستوري، قسم الشريعة، كلية الشريعة والعلوم القانونية، جامعة السيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية، ٢٠٢٣، المشرف يسرون مناور، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: مساعدة رأس المال التجاري، دبهجت، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

يستند هذا البحث إلى لائحة عمدة كديري رقم ٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن التعديلات على لائحة عمدة المدينة رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٢ بشأن التعليمات الفنية لتوفير مساعدة رأس المال التجاري مصدرها أموال تقاسم الإيرادات من الرسوم غير المباشرة على منتجات التبغ، ولكن في تنفيذها مساعدة رأس المال التجاري في قرية نجاديريجو لا تزال منطقة مدينة كديري تواجه العديد من المشاكل، مما يؤدي إلى عدم حصول العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على مساعدة رأس المال التجاري. لذلك يهتم الباحث بإجراء بحث في شكل أطروحة بعنوان "المراجعة القضائية للوائح تقديم مساعدة رأس المال التجاري من صناديق تقاسم أرباح التبغ في قرية نجاديريجو، منطقة مدينة كديري."

يركز هذا البحث على المراجعة القانونية للوائح تقديم مساعدة رأس المال التجاري من أموال تقاسم الإيرادات من الرسوم المفروضة على منتجات التبغ في قرية نجاديريجو، منطقة مدينة كديري، هو: (١) كيف يتم تنفيذ تقديم مساعدة رأس المال التجاري من تقاسم الإيرادات الأموال الناتجة عن إفراز التبغ في قرية نجاديريجو، منطقة مدينة كديري؟ (٢) ما هي المراجعة القانونية للوائح تقديم مساعدة رأس المال التجاري من أموال تقاسم الإيرادات من صادرات التبغ في قرية نجاديريجو، منطقة مدينة كديري؟ (٣) ما هي مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتوفير مساعدة رأس المال التجاري من صناديق تقاسم عائدات تصدير التبغ؟ يهدف هذا البحث إلى: (١) تحديد مدى تنفيذ توفير مساعدة رأس المال التجاري من أموال تقاسم الإيرادات من صادرات التبغ في قرية نجاديريجو، منطقة مدينة كديري. (٢) لمعرفة المراجعة القانونية للوائح تقديم مساعدة رأس المال التجاري من أموال تقاسم الإيرادات من صادرات التبغ في قرية نجاديريجو، منطقة مدينة

كيديري. ٣) للتعرف على الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتوفير مساعدة رأس المال التجاري من صناديق تقاسم عائدات تصدير التبغ. طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني التجريبي مع النهج القانوني والقضائي.

تظهر نتائج هذا البحث أن: تنفيذ برنامج مساعدة رأس المال التجاري في قرية نجاديريجو، هناك عدة مراحل، أولها التنشئة الاجتماعية التي تحتوي على كيفية التسجيل والمتطلبات التي يجب استيفائها من قبل المتقدمين المحتملين. ثانياً، هو فتح التسجيل للحصول على مساعدة رأس المال التجاري والتي يمكن إجراؤها عبر الإنترنت عبر الويب وغير متصل في مكتب خدمات التجارة والصناعة. ثالثاً: يقوم القسم بمرحلة التحقق من بيانات ملفات المسجلين المحتملين. رابعاً، يتعاون القسم مع أطراف ثالثة، أي المساحين، للتحقق من البيانات مباشرة في الميدان. خامساً، تقدم الإدارة إعلانات حول المستفيدين من مساعدة رأس المال التجاري وتشرف على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تتلقى مساعدة رأس المال التجاري من خلال النظر في دفاتر النفقات وفقاً رأب (خطة ميزانية الإنفاق) الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. بناءً على نتائج البحث، لا تزال هناك العديد من المشكلات، وهي: أ) لا تزال التنشئة الاجتماعية فيما يتعلق بمساعدة رأس المال التجاري غير معروفة على نطاق واسع من قبل العديد من الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، في حين يتم تنفيذ هذه التنشئة الاجتماعية نفسها مباشرة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية؛ ب) ادعاءات الابتزاز أثناء توزيع أموال مساعدة رأس المال التجاري حيث كان من المفترض أن تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على المبلغ الكامل البالغ ٢, ٠٠٤, ٠٠٠ روبية إندونيسية في مساعدة رأس المال التجاري ولكن تم تخفيض هذا المبلغ إلى ٢, ٠٥٣, ٠٠٠ روبية إندونيسية لكل شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ ج) في اختيار المستندات الخاصة بتسجيل متطلبات مساعدة رأس المال التجاري التي نفذتها الدائرة، كانت هناك العديد من المشاكل، وهي أن هناك مؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قامت بالتسجيل عن طريق استيفاء المتطلبات ولكنها لم تجتاز مرحلة التحقق من الملف، بينما كانت هناك مؤسسة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لم تقم بذلك لا يستوفي المتطلبات ولكنه اجتاز التحقق من الملف وحصل على مساعدة رأس المال التجاري. في مبدأ المساواة أمام القانون، يجب أن يحصل جميع الأشخاص في نظر القانون على ضمانات متساوية للعدالة، وكذلك في العدالة التبادلية مشكلة تحديد الحقوق العادلة بين عدة أفراد متساوين؛ د) لا توجد لوائح تحكم النسبة المئوية الدقيقة لتقديم المساعدة في رأس المال التجاري، مما قد يؤدي إلى خسائر محتملة

للحكومة، مثل حالات الفساد التي تنطوي على هذه الأموال. في نظر الشريعة الإسلامية، فإن الضرائب جائزة في الإسلام، ولكن إذا كانت الضريبة مرهقة للغاية أو تتجاوز قدرات المجتمع أو تم فرضها على سبيل الابتزاز، فيمكن تصنيفها على أنها "المقصود"، مثل: أ) يتم فرضها بشكل غير قانوني أو غير قانوني. (الابتزاز)؛ ب) تم جمعها بشكل غير عادل وتعسفي؛ ج) قيمتها تثقل كاهل حياة الناس؛ د) تستخدم للمصالح الشخصية للحاكم أو جماعته. كما أن بعض هذه المعايير لا يسمح بها الإسلام بشكل قاطع. وأيضاً، فإن تنفيذ برنامج مساعدة رأس المال التجاري هذا لم يحقق بعد فوائد لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة كديرى لأنه لا تزال هناك أوجه قصور في التنفيذ في هذا المجال. لذا فإن برنامج مساعدة رأس المال التجاري، الذي ينبغي أن يوفر فوائد شاملة لتحسين رفاهية مجتمع الأعمال في قرية نجاديريجو، بمنطقة مدينة كديرى، لا يزال غير مثالي.